

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBAGIAN BERAS PRA SEJAHTERA DI DESA SUKAMUKTI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

Reka Mei Diana
Tofan Ibrahim

E-mail: tofaniibrahim94@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan
STISIP Bina Putera Banjar

ABSTRAK

Berdasarkan observasi kami menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembagian Beras Pra Sejahtera (RASTRA) oleh pemerintah Desa Sukamukti. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Evaluasi Kebijakan Pembagian Beras Pra Sejahtera di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Alasannya karena penelitian deskriptif dilakukan dalam wilayah yang luas, kecenderungan untuk menggunakan metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penelitian skripsi, karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu guna mendapatkan data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan masalah yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, Studi lapangan yakni observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang di antaranya Kepala Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Ketua RT, dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar maka diperoleh hasil kebijakan pembagian RASTRA belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan diantaranya :a) Masih belum tepat sasaran : b) Belum tepat waktu : c) dan Rendahnya kualitas beras.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Beras Pra Sejahtera, Kualitatif

ABSTRACT

Based on our observations, we found several problems in implementing the distribution of Pre-Prosperous Rice (RASTRA) by the Sukamukti Village government. For this reason, this study aims to determine and explain the evaluation of the Pre-Prosperous Rice Distribution Policy in Sukamukti Village, Pataruman District, Banjar City. This study uses a qualitative research approach with descriptive methods. The reason is that descriptive research is carried out in a wide area, and the tendency to use this method is considered very relevant to the thesis research material because the research carried out is descriptive, that is, it describes what is happening from the events being studied. In addition, in order to obtain objective and valid data in order to solve existing problems. Data collection techniques in this study are library research, field studies, observation, and interviews. There were 4 informants in this study including the Village Head, the Head of the Welfare Section, the Head of RT, and the Community. Based on the results of research in Sukamukti Village, Pataruman District, Banjar City, the results of the RASTRA distribution policy are not entirely in accordance with the provisions including a) Still not on target: b) Not on time: c) and low quality of rice.

Keywords: Policy Evaluation, Pre-Prosperous Rice, Qualitative

PENDAHULUAN

Beras pra sejahtera adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Beras pra sejahtera tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam Kluster I tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Instruksi presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional, khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) disamping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Program Beras pra sejahtera dapat dicapai melalui Koordinasi antara instansi/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

Tidak seluruh masyarakat Indonesia yang berhak atas Beras pra sejahtera, hanya mereka yang tergolong miskin dan rawan pangan di daerah tertentu mendapat hak untuk menerima Beras pra sejahtera. Untuk

memilih kelompok yaitu sesuai criteria yang ditetapkan data keluarga pra sejahteraan rawan pangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Kelurahan, LSM, dan sebagainya. Data tersebut dibawa ke musyawarah Desa untuk diteliti kebenarannya dan dikoreksi, apabila ada data yang rangkap atau yang tidak sesuai, kemudian musyawarah Desa memilih dan menetapkan keluarga yang termasuk paling miskin dan rawan pangan sesuai jumlah plafon yang disediakan. Pemilihan dapat menggunakan sistem rangking sehingga hanya mereka yang benar-benar paling miskin dan rawan pangan saja yang dipilih.

Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dan merupakan kelurahan di wilayah kota dan letaknya agak dekat dengan Pusat Pemerintahan Kota Banjar, dalam segala bidang Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjarselalu menjadi tolak ukur keberhasilan program bagi desa-desa lainnya. Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjarmasin mempunyai 7 (tujuh) dusun. Desa Sukamukti termasuk dalam desa yang letaknya di dekat kota, tetapi di desa ini sebagian masyarakatnya masih pra sejahtera dan mata pencahariannya hanya sebagai buruh harian, buruh mengelola lahan orang, pengangkut barang di pasar, tukang ojek, tukang cuci dan lain-lain, dan pekerjaan itu tidak bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara layak dan mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.

Mereka juga tidak bisa mendapatkan penghasilan yang tetap dan hanya sewaktu-waktu. Tergantung dari ada dan tidaknya orang yang membutuhkannya jasa mereka. Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar sesuai dengan data monografi Desa Sukamukti tahun 2018 memiliki Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 653, RTS-PM tersebut pada bulan Januari s.d Mei Tahun 2017 mendapat masing-masing 5 kg dengan total

keseluruhan 3.265 kg dan bulan Juni s.d Desember tahun 2017 masing-masing mendapat 5 kg dengan total 3.265 kg pada tahun 2018 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 215, RTS-PM tersebut pada bulan Januari s.d Mei Tahun 2018 mendapat masing-masing 5 kg dengan total keseluruhan 1.075 kg dan bulan Juni-Desember tahun 2018 masing-masing mendapat 5kg dengan total 1.075 kg. Beras pra sejahteratersebut di order dari Sub Bulog Divre Banjar. Rumah Tangga Sasaran Penerima

LANDASAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2006) adalah: *"public policy is whatever governments choose to do or not to do"*. Artinya apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Definisi makna kebijakan publik menurut Thomas Dye tersebut diatas mengandung makna bahwa: Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya.¹

Evaluasi Kebijakan

Kata evaluasi seringkali didengar bahkan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kerangka

individu atau organisasi. Evaluasi sebuah pelaksanaan program sangatlah penting, jika ingin mengetahui sejauhmana sebuah program bisa berhasil atau tidaknya. Evaluasi akan memberikan gambaran mana yang berjalan optimal dan mana yang tidak berjalan optimal dalam sebuah pelaksanaan program. Berikut ini adalah pengertian dari evaluasi yang menjadi pembahasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) kata evaluasi artinya penilaian atau hasil. Menurut (Arikunto, 2006) Evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian, penelitian evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program tersebut.

Menurut Worthen dan Sandhers dalam (Arikunto, 2006); "Evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu". Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang.

Seseorang yang telah mengerjakan suatu hal pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya, atau belum. Ralph Taylor dalam (Arikunto, 2010), evaluasi adalah "Proses yang menentukan sejauh mana tujuan dalam setiap program dapat tercapai". Sedangkan Viji Srinivasan dalam (Arikunto, 2010), "Mengevaluasi berarti menguji dan mentukan suatu nilai, kualitas, kadar kepentingan, jumlah, derajat, atau keadaan". Srinivasan dalam (Arikunto, 2010) juga mengartikan evaluasi adalah proses penentuan keputusan tentang lingkup perhatian, pemilihan informasi yang perlu, serta pengumpulan dan analisis informasi guna memberi ringkasan data

¹ Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 2.

yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam memilih diantara berbagai alternatif yang ada.

Sedangkan (Sudjana, 2000) berpendapat Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan telah tercapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan atau dampak apa yang terjadi setelah program ditentukan.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik. Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “ Evaluation”, yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan (Thoha, 1991).

Islamy (1994) mengatakan bahwa penilaian kebijaksanaan (evaluasi) adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijaksanaan (Islamy, 1994). Salah satu aktivitas fungsional, penilaian kebijaksanaan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijaksanaan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijaksanaan. Penilaian kebijaksanaan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dandampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijaksanaan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijaksanaan, implementasi kebijaksanaan, legitimasi kebijaksanaan dan seterusnya.

Menurut Dye dalam (Silalahi, 1989), evaluasi kebijaksanaan adalah studi tentang konsekuensi-konsekuensi kebijaksanaan secara menyeluruh efektifitas suatu program nasional dalam mencapai sasarannya, atau penilaian efektifitas relatif dari dua atau lebih program yang mencerminkan tujuan-tujuan bersama. Dalam (Tayibnapis, 2000),

beberapa definisi oleh beberapa pakar evaluasi, antara lain:

a) Malcolm (Provus, 1971) mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih.

Penjelasannya bahwa evaluasi akan menemukan apakah ada perbedaan apa yang ada dengan mengacu pada standar yang ditentukan, sehingga hasilnya bisa mengetahui apakah terdapat selisih antara apa yang direncanakan dengan hasil akhirnya.

b) Stufflebeam (1985), merumuskan evaluasi sebagai “Suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.

Penjelasannya bahwa evaluasi merupakan rangkaian proses yang dilakukan dengan menggambarkan untuk memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk merumuskan alternatif keputusan, sehingga bisa memilih keputusan apa yang akan diambil (Stufflebeam, 1985).

c) Alkin (1969) mendefinisikan evaluasi sebagai “Suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif (Alkin, 1969).

Penjelasannya bahwa evaluasi adalah proses dimana suatu keputusan yang diambil diyakinkan kebenarannya dengan memilih informasi yang tepat dan mengumpulkan serta menganalisis informasi, kemudian dibuat laporannya untuk bisa diambil keputusan dari sekian alternatif keputusan.

Wibawa (1994), evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui empat aspek, yaitu: (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) Konsekuensi kebijakan, dan (4) efektifitas dampak kebijakan (Wibawa, 1994). Evaluasi kebijakan publik mempunyai empat fungsi, yaitu:

- 1) Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- 2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- 3) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- 4) Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomidari kebijakan tersebut.

Menurut Dunn dalam (Wibawa, 1994), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

- 1) Fokus Nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu,

kelompok atau sejumlah masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

- 3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).
- 4) Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh mana berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dan dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) ataupun eksentris (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Kriteria – kriteria evaluasi program kebijaksanaan menurut Dunn (1987):

- 1) Relevansi, evaluasi harus memberi informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan pelaku kebijaksanaan yang lain dan harus menjawab pertanyaan yang benar pada waktu yang tepat.
- 2) Signifikansi, evaluasi harus memberikan informasi bahwa baru dan penting bagi pelaku kebijaksanaan untuk beranjak lebih dari yang selama ini mereka anggap jelas dan terang
- 3) Validitas, evaluasi harus memberikan pertimbangan yang persuasif dan

seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijaksanaan atau program.

- 4) Reliabilitas, evaluasi harus berisi bukti bahwa kesimpulan tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan tidak konsisten
- 5) Obyektifitas, evaluasi harus melaporkan kesimpulan dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak bias, yaitu informasi yang membuat evaluator-evaluator dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang sama.
- 6) Ketepatan waktu, evaluasi harus membuat informasi tersedia pada waktu keputusan harus dibuat.
- 7) Daya guna, evaluasi harus menyediakan informasi yang dapat digunakan dan dimengerti oleh pengambil keputusan dan pelaku kebijaksanaan lain.

Model Evaluasi Kebijakan

Ada beberapa jenis evaluasi, yang dalam hal ini peneliti menggunakan model evaluasi dari (Lester & Stewart, 2000) Evaluasi ini di tujukan untuk melihat sebagian-sebagian penghambat dan keberhasilan suatu kebijakan, yang di gunakan untuk mengawasi suatu program,yaitu:

1. Evaluasi input, evaluasi ini di lakukan untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai cara pelaksanaan suatu program kebijakan dan menilai hasil dari suatu program kebijakan. Setidaknya ada variabel utama yang masuk dalam evaluasi ini yaitu, masyarakat (peserta program), tim atau staf dan program.
2. Evaluasi proses, evaluasi ini di lakukan untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang di hadapi. Evaluasi ini memfokuskan diri pada efektivitas program yang melibatkan interaksi langsung antara klien dengan staf terdepan merupakan pusat dari pencapaian tujuan program, evaluasi ini harus menilai apakah tujuan yang sudah

di tetapkan benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada.

3. Evaluasi hasil, evaluasi ini di lakukan untuk menilai seberapa jauh tujuan-tujuan yang sudah di rencanakan tercapai, yakni di arahkan kepada evaluasi keseluruhan dampak suatu program terhadap penerima layanan. Evaluasi ini juga di gunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang sudah di tetapkan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jika dikaitkan dengan evaluasi kebijakan pembagian beras pra sejahtera (rastra) di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, maka metode penelitian yang paling tepat digunakan adalah deskriptif

Teknik Analisis Data

Ada 3 (tiga) macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung sebagaimana yang dikemukakan oleh John W. Creswell (1994) yaitu:

1. Reduksi data, mengumpulkan informasi yang di dapat dan menyederhanakan informasi tersebut, memilih hal-hal pokok dan memfokuskannya pada hal-hal penting, mencari tema atau pola dari laporan atau data yang didapat di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, disamping mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.
2. Display data atau penyajian data, menyajikan berbagai informasi dari data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna

dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada mulanya kesimpulan tersebut tentunya masih sangat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data dan melalui verifikasi yang terus dilakukan selama penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan akurat. (Creswell, 1994)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses penelitian, maka di dapat beberapa argumentasi dari jawaban Informan tentang Evaluasi Kebijakan Pembagian Beras Pra Sejahtera di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, agar lebih baik lagi. Selanjutnya akan di bahas dalam uraian jawaban wawancara yang di lakukan pada beberapa informan.

Di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar pembagian beras pra sejahtera ini di berikan kepada warga yang membutuhkan dan terdaftar pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat atau yang biasa di sebut RTS-PM. Tujuan di berikan Beras pra sejahtera guna membantu meringankan beban kepada warga penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya dalam bentuk beras.

Pembagian Beras Pra Sejahtera dalam pelaksanaannya masih kurang tepat sasaran dan belum terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan analisa dan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan aparat Desa. Yang mana dari beberapa indikator yang menentukan keberhasilan Evaluasi Kebijakan Pembagian Beras Pra Sejahtera hanya ada sebagian indikator yang di katakana tepat dan sebagian lagi belum tepat, diantaranya yaitu:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat
Pembagian beras pra sejahtera bagi masyarakat miskin bertujuan untuk

mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di samping itu program ini di maksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

2. ketepatan jumlah pembagian beras pra sejahtera di desa sukamukti sudah sesuai dengan peraturan. aparat kelurahan dan kepala lingkungan RT sudah memberitahukan kepada setiap penerima beras pra sejahtera mengenai jumlah beras yang di terima. Mereka juga sudah melaksanakan tugas dan peran masing masing sesuai dengan fungsinya.
3. Tepat Harga
Harga penebusan beras pra sejahtera menurut Pemerintah yang di tetapkan adalah sebesar Rp. 1.600/kg. tetapi Pemerintah Kota Banjar melalui tim koordinasi Desa tidak melakukan penggantian beras pra sejahtera yang di bagikan kepada setiap RTS-PM di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
4. Tepat Waktu
Pelaksanaan pembagian Beras pra sejahtera kepada rumah tangga sasaran, oleh Bulog seharusnya di lakukan setiap bulan, sesuai dengan rencana (jadwal) pembagian. Hasil penelitian Pemerintah Kota Banjar melalui tim koordinasi Desa mendistribusikan Beras pra sejahtera kepada masyarakat penerima manfaat adalah setiap 1 bulan sekali bahkan 3 bulan sekali.
5. Terpenuhi nya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu, semua penerima bantuan harus mempunyai kartu RASTRA atau kartu miskin untuk mempermudah Desa dalam mendata peserta yang menerima bantuan dan kartu tersebut yang di peroleh dari Pemerintah Desa, laporan serah terima Beras pra sejahtera dari Bulog kepada tim koordinasi Desa harus di tanda tangani

oleh kedua belah pihak. Hasil penelitian penyerahan Beras pra sejahtera harus di terima dengan baik sesuai dengan jumlah Beras pra sejahtera dan di setujui oleh pihak Bulog dan Pemerintah Desa Sukamukti. Hal ini guna mencegah tindakan kecurangan yang dapat merugikan RTS. Pelaksanaan administrasi yang di lakukan pemerintah Desa Sukamukti dengan Bulog di laksanakan dengan cukup baik dan berkomitmen untuk menjaga kebutuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Artinya pelayanan yang di berikan Pemerintah Desa Sukamukti berjalan dengan baik.

6. Tepat Kualitas

Tepat Kualitas adalah kualitas Beras pra sejahtera yang baik dan layak di konsumsi, kondisi beras baik, dan sesuai dengan standar kualitas beras yang di tetapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian kualitas Beras pra sejahtera yang di bagikan kepada RTS-PM seharusnya berkualitas baik dan layak untuk di konsumsi sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang berpendapatan rendah di Desa Sukamukti, sebaiknya beras yang di bagikan mempunyai kualitas yang baik yang berasal dari persawahan milik petani, khususnya di wilayah Kota Banjar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan penerima terhadap pelaksanaan pembagian RASTRA sangat tinggi. Karena masyarakat penerima RASTRA sangat terbantu dengan adanya program RASTRA, dampak yang di alami oleh peserta penerima beras pra sejahtera di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar sedikit membantu biaya pengeluaran rumah tangga sehingga kebijakan pembagian beras pra sejahtera di Desa Sukamukti akan terus di lanjutkan karena sesuai dengan tujuan.

Kebijakan pembagian beras pra sejahtera bagi rumah tangga miskin (RTS) di harapkan dapat menekan peningkatan

proporsi penduduk miskin. Namun tingkat kemiskinan semakin tinggi jika tingkat ketepatan sasaran semakin rendah. Pedoman umum Beras Pra Sejahtera menunjukkan bahwa tujuan program Beras Pra Sejahtera adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan pembagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian beras pra sejahtera di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar sudah di laksanakan dengan maksimal dan sesuai prosedur namun ada beberapa kendala di antara nya:

1. Tidak tepat sasaran,
2. Rendahnya kualitas beras
3. Pembagian RASTRA tidak tepat waktu
4. Tidak tepat harga

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut bagi Pemerintah di harapkan untuk:

1. Pemerintah menetapkan masyarakat yang mendapatkan bantuan Beras Pra Sejahtera harus di perhatikan dan di awasi dari pihak Pemerintah provinsi maupun pemerintah.
2. Pemerintah harus mengontrol dan mengawasi pendistribusian beras, dan juga pemerintah harus mengontrol standar mutu dari beras yang akan di distribusikan ke Desa.
3. Perlunya turun lapangan langsung oleh pihak BKKBN untuk melihat bagaimana proses penyerahan beras pra sejahtera di Desa yang menerima Beras pra sejahtera.
4. Perlu di tingkatkan lagi kualitas beras pra sejahtera.
5. Hendaknya pemerintah Desa meminta daftar nama rumah tangga sasaran yang terdaftar secara resmi sebagai penerima RASTRA agar dapat di ketahui apakah nama-nama tersebut masih termasuk masyarakat miskin atau tidak.

Saran

Penulis mencoba memberikan saran untuk sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus mendata ulang masyarakat yang berhak menerima bantuan Beras, mendata masyarakat yang rentan miskin, mengajukan biaya angkut dalam anggaran Desa, mengajukan penambahan kuota penerima Beras.
2. Pemerintah mengontrol dan mengawasi pembagian Beras. Pengawasan agar tidak terjadi keterlambatan dan Pemerintah juga harus mengontrol standar mutu dari beras yang akan di distribusikan ke Desa.
3. Masyarakat penerima Beras harus bisa mencari tahu informasi program-program baru dari Pemerintah agar masyarakat memiliki pengetahuan yang luas mengenai program Beras Pra Sejahtera.
4. Untuk menghindari terulangnya kembali faktor-faktor penghambat yang di temukan dalam pelaksanaan distribusi bantuan Beras pra sejahtera oleh Pemerintah maka memerlukan penanganan yang lebih serius.
5. Aparat Desa meminta daftar nama RTS-PM yang terdaftar secara resmi sebagai penerima RASTRA agar dapat di ketahui apakah nama-nama tersebut masih termasuk masyarakat miskin atau tidak.
6. Pembagian RASTRA perlu di tingkatkan agar tujuan program pembagian RASTRA dapat tercapai dengan baik, seperti meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sasaran penerima RASTRA, ketepatan jumlah RASTRA, kualitas RASTRA, sehingga program tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.

Agus P., Erwandan Dyah Ratih S. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Agustino Leo, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RinekaCipta.

Dwijowijoto RN. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Effendi, Sofyan, 2005. *Modernisasi Tata Laksana Pelayanan Publik*. Makalah. Yogyakarta: Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi.

Handarayaningrat, Soewarno, 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung

Islamy, M. Irfan, 2001. *Reformasi Pelayanan Publik*, Makalah Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Globalisasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek

Kaloh, J, 2002. *Kepala daerah (Pola Kegiatan, kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Jakarta. Gramedia

Lester, James P., dan Joseph Stewart Jr., (2000) *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Belmont: Wadsworth

Nawawi, Hadari, 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada Press

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik :Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta :Kelompok Gramedia.